

Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Di Kabupaten Jember

Oleh:Mustafin Cahya Permadani, NIM: 1410111078
Dosen Pembimbing: Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Email: aphinpermadani@gmail.com

Abstrak

Upah merupakan hak dari seorang pekerja yang didapat berupa imbalan atas pengabdian tenaga dan pemikirannya kepada orang lain. Ketentuan pengupahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan mengenai bagaimana hak para pekerja tentang pembayaran upah. Namun tidak seperti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai upah minimum, pada kenyataannya tidak semua pengusaha mampu membayar pekerjanya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan upah minimum di Kabupaten Jember dan apakah penerapan pembayaran upah minimum sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Metodologi penelitian dalam penulisan menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, jenis penelitian yang digunakan secara yuridis normatif. Namun faktanya pengusaha di Kabupaten Jember tidak semua menerapkan pembayaran pekerja berlandaskan upah minimum. Jika pengusaha tidak bisa membayar upah sesuai dengan upah minimum maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan kepada instansi terkait dengan ketenagakerjaan (Disnakertrans) dan berkonsultasi serta mediasi pengusaha dan serikat pekerja.

Kata Kunci : Pengupahan, Upah Minimum, Kabupaten Jember

Abstract

Wages are the rights of a worker obtained in the form of compensation for the dedication of energy and thought to others. Provisions for wages have been regulated in Government Regulation Number 78 of 2015 concerning remuneration. The Government Regulation describes how the rights of workers to pay wages. But unlike what has been set by the government regarding minimum wages, in fact not all entrepreneurs are able to pay their workers with the provisions set by the regional government. The purpose of this study is to find out how the application of minimum wages in Kabupaten Jember and whether the implementation of payment of minimum wages is in accordance with those set by the government. The research methodology in writing uses the legal problem approach, the type of research used is normative juridical. But the fact is that entrepreneurs in Kabupaten Jember do not all apply worker payments based on

minimum wages. If the employer cannot pay wages in accordance with the minimum wage, the employer can submit a suspension to the agencies related to labor (Disnakertrans) and consult and mediate between employers and unions.

Keywords : wages, minimum wage, Kabupaten Jember

